

RINGKASAN

Fenomena yang belakangan ini terjadi di Indonesia adalah pandemi Covid-19. Dimana Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di belahan dunia. Akan tetapi untuk menangani permasalahan pandemi yang dampaknya juga dirasakan oleh berbagai sector kehidupan, bukanlah hal yang mudah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan pandemi ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Dalam skala yang lebih kecil, pembentukan satuan tugas percepatan penanganan covid-19 tertuang dalam kebijakan publik yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Program ini merupakan respon yang dilaksanakan pemerintah provinsi Jawa Tengah melihat fenomena kasus covid-19 di wilayah tersebut.

Sebagai sebuah program provinsi, Jogo Tonggo dilakukan di semua daerah yang termasuk ke dalam lingkup wilayah provinsi Jawa Tengah, termasuk kabupaten Cilacap. Pembentukan satuan tugas percepatan penanganan covid-19 tertuang dalam kebijakan publik yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Dalam pelaksanaannya, Jogo Tonggo menempatkan masyarakat sebagai satuan yang menjadi *target group*. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap menyebutkan bahwa angka terkonfirmasi covid-19 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Cilacap mencapai 29.264 kasus dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 27.774 dan kematian mencapai 1.860 kasus.

Ternyata kebijakan Jogo Tonggo yang diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama enam bulan lebih akhirnya mendapatkan apresiasi berupa penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai TOP 21 Inovasi pelayanan publik Penanganan Covid-19 pada tanggal 27 November 2020. Ganjar Pranowo menanggapi penghargaan tersebut dalam jpn.com sebagai awal keberhasilan, meski masih menyempurnakan dengan adaptasi pada kondisi local. Meski demikian, per 1 Juni 2020, posisi Jawa Tengah dalam jumlah kasus positif Covid-19, menduduki posisi besar, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan jumlah 1417 kasus, dengan penambahan perhari masih fluktuatif dari 5-31 kasus. Hal ini memang menunjukkan penyebaran virus masih dalam tahap cukup mengkhawatirkan. Sempat dalam posisi melandai, setelah lebaran, namun tanggal 31 Mei 2020 ada lonjakan penambahan hingga 31 orang.

Namun demikian apakah angka penambahan ini bisa dengan serta menunjukkan ketidakberhasilan Gerakan jogo tonggo di tengah masyarakat.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dalam tahap formulasi atau tidak terjadi keseimbangan antara visi dan realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Program SPSS dengan Uji t (Parsial), Uji F (Simultan), Koefisien Determinasi. Dengan di dapatkan persamaan regresi linear berganda yaitu $Y = 5,133 + 0,257 X_1 + 0,814 X_2 + 0,304 X_3 + 0,459 X_4$ dimana pengujian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas (Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi) terhadap Variabel terikat (efektivitas implementasi) secara parsial dengan menggunakan taraf signifikansi (α)= 0,05 dan (*degree of freedom*) = $n - k - 1$ (df). Sebagaimana hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Cilacap sebesar sebesar 79,9% dan sisanya sebesar 20,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Kata kunci : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Efektivitas Implementasi Kebijakan.

SUMMARY

The phenomenon that has recently occurred in Indonesia is the Covid-19 pandemic. Where this phenomenon not only occurs in Indonesia but also occurs in other parts of the world. However, to deal with pandemic problems whose impact is also felt by various sectors of life, is not an easy thing. One of the efforts made by the Indonesian government to tackle this pandemic problem is contained in Presidential Decree Number 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as amended by Presidential Decree Number 9 of 2020 concerning Amendments to Presidential Decree Number 7 of 2020. On a smaller scale, the formation of a task force to accelerate the handling of Covid-19 is contained in public policy carried out by the Central Java Provincial Government through the Instruction of the Governor of Central Java as Chairperson of the Task Force for the Acceleration of Covid-19 Handling in Central Java Province Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in the Acceleration of Covid-19 Handling at the Rukun Warga (RW) Level through the Establishment of the Jogo Tonggo Task Force. This program is a response implemented by the Central Java provincial government to the phenomenon of covid-19 cases in the region.

As a provincial program, Jogo Tonggo is carried out in all regions included in the scope of the Central Java province, including Cilacap district. The establishment of the task force to accelerate the handling of Covid-19 is contained in the public policy promoted by the Central Java Provincial Government through Central Java Governor Instruction Number 1 of 2020 concerning Community Empowerment in Accelerating Covid-19 Handling at the Rukun Warga (RW) Level through the Establishment of the Jogo Tonggo Task Force. In its implementation, Jogo Tonggo places the community as a unit that is the target group. Data from the Cilacap Regency Health Office states that the number of confirmed Covid-19 cases until 2021 in Cilacap Regency reached 29,264 cases with 27,774 recovered cases and 1,860 deaths.

It turns out that the Jogo Tonggo policy implemented by the Central Java Provincial Government for more than six months finally received appreciation in the form of an award from the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform as the TOP 21 public service innovation for handling Covid-19 on November 27, 2020. Ganjar Pranowo responded to the award in jnn.com as the beginning of success, although he is still perfecting it by adapting to local conditions. However, as of June 1, 2020, Central Java's position in the number of positive cases of Covid-19, occupies a large position, out of all provinces in Indonesia, with a total of 1417 cases, with daily additions still fluctuating from 5-31 cases. This indeed shows that the spread of the virus is still at a worrying stage. It was in a sloping position, after Eid, but on May 31, 2020 there was a spike in the addition of up to 31 people. However, does this additional number indicate the unsuccessfulness of the jogo tonggo movement in the community.

In practice, policy implementation is not always in line with what has been planned in the formulation stage or there is no balance between vision and reality.

There is almost always a distortion between the things to be achieved and the things that are achieved. This study aims to determine and examine the effect of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure on the effectiveness of the implementation of the Jogo Tonggo policy in overcoming covid-19. This research uses quantitative research methods using the SPSS Program with the t test (partial), F test (simultaneous), coefficient of determination. With the multiple linear regression equation obtained, namely $Y = 5.133 + 0.257 X_1 + 0.814 X_2 + 0.304 X_3 + 0.459 X_4$ where this test is to determine whether there is an influence of the independent variables (Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure) on the dependent variable (implementation effectiveness) partially using the significance level (α) = 0.05 and (degree of freedom) = $n - k - 1$ (df). As a result of the research, it can be concluded that the variables of communication, resources, disposition and bureaucratic structure have a significant influence on the effectiveness of the implementation of Jogo Tonggo in overcoming covid-19 in Cilacap Regency by 79.9% and the remaining 20.1% is influenced by variables not examined.

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Policy Implementation Effectiveness.

